

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Palette di Kabupaten Bone

Irmawati Surya

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: suryairma222@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine how the role of local government in this case the Department of Culture and Tourism in the development of tourism destinations, tourism marketing, tourism and human resources development and the factors that influence the development of tourism area of Tanjung Palette in Bone regency. Type of research is descriptive that aims to outline a systematic, factual and accurate information on the existing data in the field is focused on the role of the Department of Culture and Tourism in the development of tourism areas Tanjung Palette. From the research results demonstrate that the role of local government in the development of tourism areas Tanjung Palette has aligned with that contained in the Strategic Plan (RENSTRA) Regional Work Unit of Department Education and Culture, but in the execution there are problems one of which is the delay in the disbursement of funds resulting in physical work was not accomplished in accordance with the stipulated time, Destination Development Tanjung Palette for 2016 focus on improving infrastructure. Development of tourism marketing Tanjung Palette been conducted by the Department of Culture and Tourism as well as of the tourist administrator attraction, And to tour Cape Palette Human Resources Development have formed a group gempita that moves euphoria tourism business sector. Supporting factors in tourism development Tanjung Palette tourism among the Government policy support, community participation, travel around Tanjung Palette and easy coordination between the parties involved. The limiting factor in the development of tourism Tanjung Palette Among the limited funds and disbursements are slow, lack of human resources.

Keywords: The Role, Government, development, tourism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran obyek wisata, dan pengembangan SDM pariwisata serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Palette di Kabupaten Bone. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan yang difokuskan pada Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Palette. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Palette telah berjalan sesuai dengan yang termuat dalam RENSTRA SKPD Disbudpar, Namun dalam pelaksanaan terdapat permasalahan salah satunya yaitu terlambatnya pencairan dana yang mengakibatkan proyek fisik tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pengembangan Destinasi Tanjung Palette untuk tahun 2016 berfokus pada Perbaikan fisik. Pengembangan pemasaran obyek wisata Tanjung Palette telah dilakukan oleh pihak Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata maupun dari pihak penegelola obyek wisata Tanjung Pallette. Dan untuk Pengembangan SDM wisata Tanjung Pallette telah dibentuk sebuah kelompok Gempita. Faktor pendukung dalam pengembangan obyek wisata Tanjung Pallette diantaranya adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat sekitar wisata Tanjung Pallette dan mudahnya koordinasi antar pihak terkait. Adapun faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata Tanjung Pallette diantaranya yaitu dana terbatas dan pencairannya yang lambat dan kurangnya SDM pengelola.

Kata kunci: Peranan, pemerintah, pengembangan, pariwisata

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang berkembang sedang giat-giatnya melakukan usaha dalam pembangunan untuk menuju pada suatu keadaan yang lebih maju dan terarah yang meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi, keadilan sosial".

Pemerintah telah merencanakan pelaksanaan pembangunan itu dalam bentuk pembangunan nasional secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, salah satunya yaitu pembangunan di sektor pariwisata. Sektor ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena pariwisata memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang

Dasar 1945. Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Maka daerah dipicu untuk dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan didaerahnya.

Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan sektor pariwisata harus terus di tingkatkan dengan mengembangkan pendayagunaan seluruh sumber dan potensi kepariwisataan yang ada serta menggali sumber-sumber baru. Di samping itu berbagai komponen sektor yang terkait dengan sektor kepariwisataan dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan negara, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat mendorong pembangunan daerah dalam menghadapi era globalisasi, dimana terjadi persaingan yang demikian ketat.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pada pasal 14 Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan

kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2006 telah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan wisata unggulan Nasional di luar Bali, bersama Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi pariwisata unggulan untuk tahap pertama dengan pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut telah memenuhi kriteria sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Menyadari akan hal itu Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang cukup potensial di Sulawesi Selatan, mengingat potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Bone sangat beragam meliputi obyek wisata daerah pantai, dataran rendah sampai daerah pegunungan di beberapa Kecamatan. Selain itu Kabupaten Bone juga memiliki letak strategis yang terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pintu gerbang memasuki provinsi Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan seyogyanya dapat dioptimalkan dengan dukungan produk wisata yang berkualitas. Maka dari itu perlu adanya penanganan oleh pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal pengembangan yang lebih terarah dan Intensif baik berupa administrasi serta sarana dan prasarana penunjang.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bone menjadi faktor strategis dalam rangka pembangunan perekonomian daerah di masa mendatang. Kebijakan pengembangan pariwisata adalah dalam rangka mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, antara lain:

1. Pengembangan pariwisata akan mendorong efek berganda (*multiplier effect*) berkembangnya bidang-bidang industri baru yang berkaitan dengan pengembangan usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata dan lain-lain), industri dan kerajinan cinderamata, kuliner yang memerlukan perluasan bebrapa industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan serta memperluas pengembangan pasar lokal dan regional.
2. Menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.
3. Memberi dampak positif pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja baru (tugas baru dihotel atau ditempat penginapan lainnya, usaha perjalanan wisata, adanya instansi pemerintah yang mengurus kebudayaan dan pariwisata, pemandu wisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cenderamata serta tempat-tempat penjualan yang bernuansa pariwisata lainnya).

Peraturan perundang-undangan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bone dimana, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya dalam urusan kebudayaan dan pariwisata untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

Penyusunan dokumen Renstra SKPD harus sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone sebagaimana termuat dalam Perda No 3 Tahun 2008 tentang pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone. Tujuan penyusunan Renstra Dinas kebudayaan dan Pariwisata adalah untuk menjabarkan kebijakan pembangunan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan RPJMD Kabupaten Bone untuk jangka waktu 2013-2018.

Dari Rencana Strategis Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bone, Salah satu potensi pariwisata Kabupaten Bone yang akan dikembangkan yaitu obyek wisata Tanjung Pallette yang merupakan obyek wisata yang banyak dikunjungi dan menjadi salah satu tempat pariwisata favorit di Kabupaten Bone.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dari 12 objek wisata yang ada di Kabupaten Bone, Tanjung Pallette yang memberikan sumbangsih besar ke PAD, mulai Januari sampai Juli 2016 sudah berkontribusi Rp116.419.000 sedangkan 10 objek wisata lainnya Rp42.370.000. "Itu sudah masuk kontribusi karcis masuk, parkir, dan sewa vila".

Namun demikian kondisi objek wisata Tanjung Pallette masih dihadapkan dengan berbagai persoalan, diantaranya permasalahan infrastuktur, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sangat minim. Kondisi bangunan seperti Villa serta sejumlah fasilitas seperti kolam renang, nampak tidak terawat. Selain itu, faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung juga tidak 100 persen memadai. Hal itu terlihat pada panggung menjorok ke laut yang sejumlah dindingnya terlepas dan tidak dilengkapi pengaman. Hal ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar) wisata Tanjung Pallette merupakan wisata yang berkontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun demikian penghasilan tinggi ini tidak diikuti oleh pengembangan yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang pengembangan kawasan pariwisata yang difokuskan pada Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan kawasan Parawisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone.

Adapun jenis data Penelitian:

a. Data Primer

Data primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun informan itu berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara *face to face* untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih muda.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta penelusuran data On Line atau dengan menggunakan fasilitas internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Wawancara mendalam (*deep interview*)

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang

besangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan *face to face* kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara *deep interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel surat kabar, artikel di internet dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kebudayaan dan kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bone.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas Pokok sebagaimana di ataur dalam Peraturan Bupati No 45 Tahun Tentang Rincian Tugas Fungsi, dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pemerintah Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Penyusunan rencana dan program di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas, Pembinaan unit pelaksanaan teknis dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone Merumuskan visi,

“Terwujudnya Kepariwisataan yang Berkualitas dan Nilai-Nilai Budaya yang Lestari Mendukung Tercapainya Masyarakat Sejahtera”

Dalam mencapai visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan yang transparan, akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi sebagai berikut: Meningkatkan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW), Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan, Meningkatkan budaya sadar wisata dalam masyarakat, Meningkatkan promosi kepariwisataan, Meningkatkan kapasitas masyarakat akan nilai-nilai budaya lokal, Meningkatkan promosi kebudayaan daerah ke masyarakat luas serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kajian-kajian budaya lokal.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone menjabarkan Strategi dan Kebijakan tersebut dalam

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Disbudpar Tahun 2013-2018.

Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terlihat bahwa ada 7 misi yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dimulai dari tahun 2013-2018. Strategi dan kebijakan ini merupakan kerangka acuan yang dipedomani secara bertahap dan berkelanjutan dan merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dan berkelanjutan sehingga rangkaian tersebut diupayakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan sebagai cerminan dari penjabaran visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone disektor Kebudayaan dan Pariwisata.

Strategi pengemangan dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bone ada 9 poin sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas ODTW melalui perbaikan infrastruktur yang ada.
2. Membuka ODTW baru melalui kerjasama dengan pihak lain.
3. Mengembangkan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis, magang, sekolah lapang, sehingga mampu mendorong pengelolaan pariwisata yang makin professional.
4. Meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan dan bimtek.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan ODTW, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, memberdayakan masyarakat di daerah ODTW.
6. Mengembangkan Promosi pariwisata yang terintegrasi dalam program-program yang setara melalui peningkatan kapisitas aparatur dalam promosi, pengembangan model promosi pariwisata berbasis masyarakat.

7. Meningkatkan Kapisitas Masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kelompok-kelompok seni.
8. Mengenalkan budaya Kabupaten Bone ke masyarakat luas dengan promosi melalui pameran, media internet, dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni di daerah lain.
9. Menjaga kelestarian seni dan budaya Kabupaten Bone melalui kegiatan kajian, seminar, workshop, pelestarian benda budaya, dan sebagainya.

Untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan diatas memerlukan suatu kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bone, kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sarpras ODTW.
2. Pengembangan ODTW baru.
3. Mendorong aparatur untuk meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mengembangkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Peningkatan kualitas SDM pariwisata.
5. Mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penerimaan manfaat dalam pembangunan kepariwisataan.
6. Mewujudkan ODTW yang makin dikenal luas oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Berikut Indikator Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone Sebagai Berikut:

1. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Tanjung Pallette Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan sesuai dengan misi yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

yaitu meningkatkan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), dengan strategi pengembangan dan peningkatana kualitas sarana sarana dan prasarana ODTW, dengan melalui program pengembangan destinasi pariwisata yang berfokus pada pengembangan fisik.

Program pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Tanjung Pallette untuk tahun 2016 berfokus pada perbaikan (pembenahan) teras Vila yang sebelumnya terbuat dari kayu menjadi beton, dan penambahan wahana baru berupa kolam renang dewasa dengan kapasitas 60x80 m. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana pariwisata Tanjung Pallette agar lebih menarik wisatawan untuk berkunjung.

Dalam pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat permasalahan yang membawa dampak negatif dalam pelaksanaan rencana strategis, diantaranya yaitu lambatnya pencairan dana yang mengakibatkan proyek fisik tidak terlaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, seperti pembangunan kolam renang yang dipersiapkan untuk gebrakan akhir tahun terbengkalai. Pembangunan yang dijadwalkan rampung pada tanggal 15 Desember 2016 sampai tanggal 24 Desember belum terselesaikan. Berdasarkan informasi pembangunan kolam renang ini diperkirakan rampung di akhir bulan januari 2017.

1. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan

Pemasaran Obyek Wisata Tanjung Pallette

Wisata Tanjung Pallatte telah dilakukan pemasaran dan promosi baik dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun dari pihak pengelola obyek wisata Tanjung Pallette itu sendiri. Promosi ini dilakukan untuk menambah daya tarik pengunjung, dengan menampilkan konsep kelebihan obyek wisata Tanjung Pallette.

Pemasaran dan promosi Wisata Tanjung Pallette yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan bersamaan dengan obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Bone yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Promosi dapat diakses melalui media elektronik/internet di Web Resmi Kabupaten Bone pada bagian Potensi sektor pariwisata Kabupaten Bone, selain itu pemasaran juga di lakukan dengan membuat pamphlet, papan reklame, baleho, Buklet dan promosi lainnya melalui keikutsertaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata pada event-event pariwisata diluar daerah.

Pemasaran juga dilakukan oleh pihak pengelolah obyek wisata Tanjung Pallette pemasaran ini melalui media cetak dan eloktronik dengan memaparkan daya tarik, fasilitas dan peningkatan jumlah pengunjung yang secara berkala kami masukan ke Koran tingkat daerah serta di media sosial lainnya. Pemasaran Wisata Tanjung Pallette telah bekerjasama dengan korang tingkat daerah seperti Fajar Bone dan Tribun Timur.

2. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan SDM Pariwisata Tanjung Pallette

Pengembangan kualitas SDM tidak hanya bagi aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dilakukan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat di sekitar obyek wisata Tanjung Pallette. Salah satunya programnya yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Wisata (Gempita).

Gerakan Masyarakat Peduli Wisata (GEMPITA) Merupakan kelompok Masyarakat pencinta dan pengelola serta pemerhati pariwisata yang berada disekitar kelurahan Pallette. Gempita terbagi atas kelompok-kelompok masyarakat yang Bergerak di sektor wisata diantaranya:

1. Pemandu Wisata (wisata Inggris) dimotori oleh Pemerintah Kabupaten Bone

Wisata Inggris yaitu kelompok masyarakat yang mampu menjelaskan potensi dan keberadaan wisata Tanjung Pallette pada wisatawan yang datang berkunjung dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk akhir tahun 2016 bupati Bone H Andi Fahsar M Padjalangi merespon positif kelompok ini dengan membuat sebuah perkampungan yang diberi nama Bone Wisata English Village. alasan dipilihnya Pallette sebagai kampung Inggris karena tempatnya sangat cocok untuk dijadikan tempat berwisata sambil belajar. untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada warga

- pemerintah telah menerjunkan sebanyak 14 tenaga tutor pengajar.
2. Kelompok usaha jasa pariwisata yang bergerak di sektor makanan dan minuman (Kuliner) yang berbahan baku produk lokal masyarakat seperti ikan dan rumput laut yang dimotori oleh paran Nelayan di sekitar obyek wisata Tanjung Pallette.
 3. Penyewaan perahu dan peralatan memancing seperti penyiapan jorang dan umpan sebagai sarana untuk rekreasi tanjung Pallette.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan.

Salah satu program pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan obyek wisata Tanjung palette yaitu dengan melakukan pelatihan 2 kali per tahun, yang diprioritaskan untuk pemandu wisata dan resepsionis untuk mengikuti pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mengembangkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

Adapun yang menjadi kendala dalam pengembangan kualitas Pelayanan yaitu kurangnya SDM dalam pengelolaan obyek wisata Tanjung Pallette. Sumber daya manusia di wisata Tanjung Pallette hanya 13 orang yang mengurus kurang lebih 5 hektar area wisata Tanjung Pallette.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wisata Tanjung Palette

Faktor Pendukung

1. Wisata Tanjung Palette unik dan menyimpan cerita rakyat sebagai tempat pembuangan yang indah

Tanjung Palette terletak dikelurahan Palette, 12 km dari kota Watampone. perjalanan ke kawasan wisata ini sekitar 1 jam dari kota Watampone. Sepanjang jalan kita bisa menikmati aktifitas masyarakat dan juga hamparan sawah para penduduk. Meskipun lokasinya di pinggir pantai teluk Bone, kawasan wisata Tanjung Palette, berbeda dengan kawasan wisata pantai lainnya di Sulawesi Selatan.

Tak seperti pantai pada umumnya yang menawarkan keindahan pasir putih. Namun tempat wisata ini memiliki khas tersendiri. Tumbuhan rindang diatas bukit karang serta tebing yang dihiasi akar pohon, memberikan suatu nuansa yang berbeda.

Dibalik keindahan pemandangan yang dimilikinya, menurut cerita rakyat yang turun temurun, Tanjung Palette Bone sejatinya adalah tempat *mallabu tau*, yang dalam bahasa Bugis berarti tempat menenggelamkan orang. Pada masa kerajaan Bone, Tanjung Palette ini menjadi lokasi untuk menenggelamkan orang-orang yang melakukan pelanggaran yang berat yaitu melakukan perselingkuhan. Mereka yang telah berkeluarga namun berselingkuh akan diikat bersama lalu dibuang di sana.

Cerita ini tentu menambah daya pikat tempat wisata Tanjung Palette, selain sajian keindahan panorama bukit karang yang terjal, Tanjung Palette juga menyimpan cerita masa lalu.

2. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah

Wisata Tanjung Palette merupakan obyek wisata unggulan yang menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Bone, Untuk itu Pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah. Dukungan tersebut juga dibuktikan dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana di wisata Tanjung Palette.

wisata Tanjung Palette adalah wisata unggulan Kabupaten Bone yang satu-satunya obyek wisata yang secara khusus besaran retribusinya diatur langsung dalam peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Selain Peraturan daerah pengembangan obyek wisata di Kabupaten Bone (Tanjung Palette) juga diatur dalam RPJMD Kabupaten Bone yang tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan misi pengembangan sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata yang sudah ada di kabupaten Bone dengan kebijakan perbaikan infranstruktur yang ada.

3. Partisipasi Masyarakat Sekitar

Dalam pengembangan obyek wisata Tanjung Palette sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat sekitar, karena secara tidak langsung upaya pengembangan pariwisata daerah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Palette sudah terjalin dengan baik.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan langsung dalam pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat sekitar dengan mendirikan sebuah kelompok Masyarakat pencinta dan pengelola serta pemerhati pariwisata berupa kelompok

masyarakat yang menyebut dirinya sebagai 'GEMPITA' yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Wisata. Kelompok masyarakat Gempita Bergerak di sektor wisata diantaranya:

1. Pemandu Wisata dimotori oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Wisata Inggris yaitu kelompok masyarakat yang mampu menjelaskan potensi dan keberadaan wisata Tanjung Pallete pada wisatawan yang datang berkunjung dengan menggunakan bahasa Inggris.
2. Kelompok usaha jasa pariwisata yang bergerak di sektor makanan dan minuman (Kuliner) yang berbahan baku produk lokal masyarakat seperti ikan dan rumput laut yang dimotori oleh para Nelayan di sekitar obyek wisata Tanjung Pallete.
3. Penyewaan perahu dan peralatan memancing seperti penyiapan jorog dan umpan sebagai sarana untuk rekreasi Tanjung Pallete.
4. Mudah-mudahan Koordinasi Antara Pihak Terkait

Pembangunan di bidang pariwisata merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengolah obyek dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi. Dengan adanya hubungan baik antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pengelola obyek wisata Tanjung Pallete memberi dampak positif dalam pengembangannya. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan para pengelola obyek wisata Tanjung Pallete dalam menyeret dana retribusi perbulannya, serta koordinasi dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan para pengelola obyek wisata dalam event-event tahunan sebagai sarana promosi obyek wisata.

Faktor Penghambat

1. Dana yang Terbatas dan Pencairannya yang Lambat

Salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tidak lancarnya pembangunan wisata Tanjung Pallete yaitu keterbatasan dana. Dana yang terbatas inilah yang menjadi pertimbangan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengeluarkan suatu program.

Lambatnya pencairan dana juga memberi dampak dalam pelaksanaan program pengembangan wisata Tanjung Pallete, hal ini membuat pengerjaan proyek fisik tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. Kurangnya SDM Pengelola Tanjung Pallete

Sumber daya manusia di wisata Tanjung Pallete hanya 13 orang yang mengurus kurang lebih 5 hektar area wisata Tanjung Pallete. Sumber daya manusia ini terbagi dari 1 orang Kepala pengelola wisata Tanjung Pallete, 1 orang bendahara, 2 orang resepsionis, 3 orang room villa, 3 penyapu area, 2 orang satpam, dan 1 orang petugas Tiket masuk dan 1 orang petugas mushollah, sedangkan untuk pemeliharaan dan pembersihan area parkir, permainan anak dan kolam renang tidak ada, sehingga area ini terkesan tidak terawat dan kotor yang banyak dikeluhkan pengunjung.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan Tanjung Pallete

Masih adanya masyarakat Pallete yang belum sepenuhnya atau menyadari tentang arti pentingnya pengelolaan obyek wisata. Hal ini ditandai dengan masih adanya warga Pallete yang saat berkunjung atau pun sekedar mengantar sanak keluarganya meminta untuk di gratiskan untuk masuk di obyek wisata

Tanjung Pallette hal ini dikarenakan masyarakat tersebut merasa bahwa Tanjung Pallette merupakan daerah kekuasaan mereka yang diwariskan dari nenek moyangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Tanjung Pallette

Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan sesuai dengan misi yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu meningkatkan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), dengan strategi pengembangan dan peningkatan kualitas sarana sarana dan prasarana ODTW, dengan melalui program pengembangan destinasi pariwisata yang berfokus pada pengembangan fisik.

Program pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Tanjung Pallette untuk tahun 2016 berfokus pada perbaikan (pembenahan) teras Vila yang sebelumnya terbuat dari kayu menjadi beton, dan penambahan wahana baru berupa kolam renang dewasa dengan kapisitas 60x80 m. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana pariwisata Tanjung Pallette agar lebih menarik wisatawan untuk berkunjung.

Dalam pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat permasalahan yang membawa dampak negatif dalam pelaksanaan rencana strategis, diantaranya yaitu lambatnya pencairan dana yang mengakibatkan proyek fisik tidak terlaksanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, seperti pembangunan kolam renang yang dipersiapkan untuk gebrakan akhir tahun terbengkalai.

2. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Pemasaran Obyek Wisata Tanjung Pallette

Wisata Tanjung Pallatte telah dilakukan pemasaran dan promosi baik dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun dari pihak pengelola obyek wisata Tanjung Pallette itu sendiri. Promosi ini dilakukan untuk menambah daya tarik pengunjung, dengan menampilkan konsep kelebihan obyek wisata Tanjung Pallette.

Pemasaran dan promosi Wisata Tanjung Pallette yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan bersamaan dengan obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Bone yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Promosi dapat diakses melalui media elektronik/internet di Web Resmi Kabupaten Bone pada bagian Potensi sektor pariwisata Kabupaten Bone.

Pemasaran juga dilakukan oleh pihak pengelolah obyek wisata Tanjung Pallette pemasaran ini melalui media cetak dan elektronik dengan memaparkan daya tarik, fasilitas dan peningkatan jumlah pengunjung yang secara berkala kami masukan ke Koran tingkat daerah serta di media sosial lainnya. Pemasaran Wisata Tanjung Pallette telah bekerjasama dengan korang tingkat daerah seperti Fajar Bone dan Tribun Timur.

3. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan SDM Pariwisata Tanjung Pallette

Pengembangan kualitas SDM tidak hanya bagi aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dilakukan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat di sekitar obyek wisata Tanjung Pallette. Salah satunya programnya yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Wisata (Gempita).

Kelompok Gempita merupakan kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang bergerak di sektor usaha pariwisata seperti pemandu wisata, kelompok jasa pariwisata (kuliner), dan penyewaan perahu dan peralatan memancing.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan.

Salah satu program pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan obyek wisata Tanjung palette yaitu dengan melakukan pelatihan 2 kali per tahun, yang diprioritaskan untuk pemandu wisata dan resepsionis untuk mengikuti pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam

rangka mengembangkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

Adapun yang menjadi kendala dalam pengembangan kualitas Pelayanan yaitu kurangnya SDM dalam pengelolaan obyek wisata Tanjung Pallette. Sumber daya manusia di wisata Tanjung Pallette hanya 13 orang yang mengurus kurang lebih 5 hektar area wisata Tanjung Pallette.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan obyek wisata Tanjung Pallette

- a. Faktor pendukung dalam pengembangan obyek wisata Tanjung Pallette diantaranya yaitu wisata Tanjung Pallette unik dan menyimpan cerita rakyat sebagai tempat pembuangan yang indah, adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat sekitar wisata Tanjung Pallette dan mudahnya koordinasi antar pihak terkait.
- b. Faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata Tanjung Pallette diantaranya yaitu dana terbatas dan pencairannya yang lambat, kurangnya SDM pengelola Tanjung Pallette dan rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan Tanjung Pallette.

Saran

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus lebih selektif memilih sarana dan prasarana yang akan diperbaiki agar pengunjung merasa aman dan nyaman saat berkunjung misalnya perbaikan dermaga yang dianggap berbahaya terutama untuk anak kecil sampai akhir tahun 2016 belum diperbaiki.
2. Pihak pengelola dalam pemeliharaan fasilitas Tanjung Pallette harus lebih

diperhatikan untuk menjadikan wisata Tanjung Palette sebagai wisata andalan yang berjangka panjang.

3. Perlunya penambahan tenaga kerja di obyek wisata Tanjung Palette
4. Meningkatkan keselamatan pengunjung dengan memberikan imbauan dan informasi yang jelas dan lebih mengefektifkan komunikasi dengan pengunjung agar merasa nyaman dan aman dengan menempatkan pekerja di setiap fasilitas wisata Tanjung Palette.

DAFTAR PUSTAKA

- Muljadi, A.J, (2010). *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nukma, Usman, (2013). *Bone Pesona Dunia*, Bone: Pelita Pustaka.
- Pendit, Nyoman S, (2006). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Pitana, G, (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suwarno, G. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta.
- Warpani P. dkk. (2007). *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*, ITB Bandung.
- Wahab. S. (1998). *Manajemen Kepariwisata*, Jakarta: PT Pradya.
- Yoeti, (2013). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Youshand, A, (2013). *Pesona Wisata Kabupaten Bone*, Bone: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bone